



Model Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (Studi Kasus di Negeri Laha Teluk Ambon Baguala Kota Ambon)

Ali Roho Talaahu^{1*}, Rachmat Faisal²

Universitas Darussalam Ambon, Indonesia^{1,2}

Email: qalamqia@gmail.com^{1*}, rafasambonmanise@gmail.com²

Kata Kunci

Masyarakat Pesisir;
Nelayan Pesisir;
Pemberdayaan.

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis model pemberdayaan masyarakat pesisir di Negeri Laha, Kecamatan Teluk Ambon Baguala, Kota Ambon, dengan fokus pada identifikasi faktor-faktor sosial ekonomi, budaya, ekologis, dan pengembangan sumber daya manusia yang mempengaruhi efektivitas program pemberdayaan. Target luaran dari penelitian ini adalah rumusan model pemberdayaan masyarakat pesisir yang komprehensif dan berbasis kebutuhan lokal. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan metode deskriptif kualitatif, di mana data dikumpulkan melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam dengan informan kunci, dan diskusi kelompok terfokus dengan stakeholder terkait. Lokasi penelitian bertempat di Negeri Laha, Kota Ambon, yang dipilih karena karakteristik masyarakat pesisirnya yang representatif dan kompleksitas permasalahan pemberdayaan yang dihadapi. Kebaruan penelitian ini terletak pada pengembangan model pemberdayaan integratif yang menggabungkan empat dimensi utama—sosial ekonomi, budaya, ekologis, dan pengembangan SDM—dalam satu kerangka kerja yang holistik, berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung parsial dan fokus pada aspek tunggal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek sosial ekonomi memerlukan pengembangan model kurikulum pemberdayaan berbasis ekonomi produktif yang disesuaikan dengan kondisi nelayan tradisional yang memiliki keterbatasan pendidikan formal namun kaya pengalaman empiris. Aspek budaya menunjukkan perlunya revitalisasi transformasi sosial melalui pembentukan kelompok-kelompok sosial baru yang dapat memperkuat kohesi komunitas pesisir dan melestarikan kearifan lokal. Aspek ekologis mengidentifikasi ketidaksesuaian pemanfaatan lahan pesisir dengan fungsi peruntukannya, yang menyebabkan degradasi lingkungan dan menghambat keberlanjutan sumber daya kelautan. Aspek pengembangan sumber daya manusia mengindikasikan kebutuhan mendesak untuk menyusun kurikulum pemberdayaan yang responsif terhadap kebutuhan, kepentingan, potensi, dan peluang spesifik kelompok nelayan, dengan penekanan pada peningkatan pengetahuan, keterampilan teknis, dan kesadaran kritis terhadap pengelolaan sumber daya berkelanjutan.

Keywords:

Empowerment;
Coastal
Communities;
Coastal Fishermen

Abstract

This study aims to analyze the coastal community empowerment model in Negeri Laha, Teluk Ambon Baguala District, Ambon City, focusing on identifying socio-economic, cultural, ecological, and human resource development factors that influence the effectiveness of empowerment programs. The expected output is the formulation of a comprehensive and locally-based coastal community empowerment model. This research employs a case study approach with qualitative descriptive methods, where data were collected through participatory observation, in-depth interviews with key informants, and focus group discussions with relevant stakeholders. The research location is in Negeri Laha, Ambon City, selected due to its representative coastal community characteristics and the complexity of empowerment challenges faced. The novelty of this research lies in developing an integrative empowerment model that combines four main dimensions—socio-economic, cultural, ecological, and human resource development—within a holistic framework, differing from previous research that tends to be partial and focused on single aspects. The results show that the socio-economic aspect requires the development of a productive economy-based empowerment curriculum model adapted to the conditions of traditional fishermen who have limited formal education but rich empirical experience. The cultural aspect indicates the need for revitalizing social transformation through the formation of new social groups that can strengthen coastal community cohesion and preserve local

wisdom. The ecological aspect identifies misalignment between coastal land use and its designated function, causing environmental degradation and hindering marine resource sustainability. The human resource development aspect indicates an urgent need to prepare an empowerment curriculum responsive to the specific needs, interests, potentials, and opportunities of fishermen groups, with emphasis on enhancing knowledge, technical skills, and critical awareness of sustainable resource management.

PENDAHULUAN

Komunitas pesisir global menghadapi tantangan kompleks yang mengancam keberlanjutan hidup mereka, dengan lebih dari 3,3 miliar orang di seluruh dunia bergantung pada sektor kelautan dan perikanan sebagai sumber mata pencaharian utama (FAO, 2022). Di negara-negara berkembang, sekitar 90% nelayan skala kecil tergolong dalam kategori rawan miskin, menghadapi ketidakpastian pendapatan, akses terbatas terhadap modal, teknologi tradisional yang kurang efisien, serta kerentanan tinggi terhadap perubahan iklim dan degradasi ekosistem laut (World Bank, 2021; UNDP, 2020). Fenomena overfishing yang terjadi secara global telah menyebabkan penurunan stok ikan hingga 34,2% dari total populasi ikan komersial berada dalam kondisi overexploited, mengancam keberlanjutan sumber daya laut yang menjadi tumpuan hidup jutaan nelayan (FAO, 2022).

Perubahan iklim memperparah kondisi ini melalui kenaikan suhu permukaan laut, acidifikasi ocean, dan meningkatnya intensitas badai tropis yang berdampak langsung pada produktivitas perikanan dan keselamatan nelayan. Coastal Vulnerability Index (CVI) menunjukkan bahwa kawasan pesisir di negara berkembang, termasuk Indonesia, memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap ancaman perubahan iklim, dengan skor CVI rata-rata 3,8 dari skala 5, mengindikasikan risiko besar terhadap erosi pantai, intrusi air laut, dan kerusakan ekosistem mangrove (IPCC, 2021). Kesenjangan dalam model pemberdayaan yang efektif menjadi tantangan utama, di mana program-program pemberdayaan yang ada seringkali bersifat top-down, tidak partisipatif, kurang responsif terhadap kebutuhan lokal, dan gagal mengintegrasikan dimensi sosial, ekonomi, budaya, dan ekologis secara holistik. Krisis pemberdayaan komunitas pesisir di negara berkembang tercermin dari tingginya angka kemiskinan pesisir yang mencapai 40-60% di wilayah Asia Tenggara, rendahnya akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, keterbatasan infrastruktur dasar, serta marjinalisasi sosial-ekonomi yang berkelanjutan (Asian Development Bank, 2020). Konteks global ini menunjukkan urgensi untuk mengembangkan model pemberdayaan masyarakat pesisir yang komprehensif, partisipatif, dan berkelanjutan, yang dapat menjawab kompleksitas tantangan yang dihadapi komunitas pesisir di era kontemporer.

Masyarakat pesisir selama ini seringkali dikategorikan sebagai kelompok masyarakat termiskin yang menghadapi tantangan kompleks dalam upaya meningkatkan taraf hidupnya. Beberapa hal yang menyebabkan kondisi ini karena rendahnya produktivitas yang masih rendah dari kegiatan usaha (Sabarisman, 2017). Kondisi ini menjadikan program pemberdayaan masyarakat pesisir sebagai salah satu prioritas penting dalam pembangunan yang bertujuan memanfaatkan potensi sumber daya pesisir secara berkelanjutan dan komprehensif. Salah satu gagasan utama dalam pemberdayaan tersebut adalah fokus pada pengembangan sumber daya manusia (SDM) masyarakat pesisir, yang diharapkan mampu mengelola lingkungan pesisir secara lebih mandiri dan berdaya saing. Hal ini senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Arfah et al., (2022) menyatakan bahwa agar lebih berdaya

saing, maka pengembangan kapasitas diorientasikan pada dimensi human resource development, dengan fokus pada ketersediaan tenaga profesional.

Pemberdayaan masyarakat pesisir dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan dan program, namun pengembangan SDM dinilai sebagai salah satu strategi yang paling efektif. Dalam konteks social pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga pendekatan: mikro, mezzo, dan makro (Handini et al., 2019). Sedangkan menurut Kristiyanti (2016) bahwa dengan dikembangkannya model baru untuk mengoptimalkan Pemberdayaan masyarakat pesisir dapat dioptimalkan taraf hidupnya menjadi lebih baik dengan pendekatan Integrated Coastal Zone Management (ICZM), pendekatan ini dapat diandalkan tidak hanya fokus pada growth economic namun juga menjamin kesetaraan pertumbuhan ekonomi secara adil dan proposional. Selain itu, salah satu langkah yang dapat diimplementasikan adalah dengan menyusun kurikulum yang dirancang khusus untuk meningkatkan kapasitas masyarakat pesisir. Kurikulum ini tidak hanya memberikan pendidikan formal, tetapi juga berfungsi sebagai model yang adaptif terhadap kebutuhan spesifik masyarakat pesisir, memungkinkan modifikasi dan implementasi di tingkat lapangan sesuai dengan karakteristik lokal. Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Nurrochsyam et al., (2017) yang menyatakan bahwa kurikulum perlu bersifat fleksibel yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip kurikulum kearifan lokal.

Pendidikan untuk pengembangan masyarakat pesisir harus dirancang berdasarkan kajian lapangan yang komprehensif. Kajian ini bertujuan untuk memetakan karakteristik dan kebutuhan spesifik masyarakat pesisir, termasuk tantangan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang mereka hadapi. Proses kajian dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat sebagai subjek aktif, sehingga dapat menghasilkan program pendidikan yang relevan dan efektif dalam menjawab kebutuhan pengelolaan sumber daya pesisir. Program-program dimaksud bisa mencakup program ekonomi, sosial, lingkungan dan infrastruktur (Baharudin, 2014), sebab persepsi masyarakat pesisir bahwa pendidikan formal dianggap tidak sesuai dan tidak relevan dengan apa yang menjadi urgensi dari keseharian mereka (Adzkiyak, 2024). Sebagai bagian dari pendekatan pemberdayaan, pendidikan yang disusun harus mengintegrasikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat melalui proses diskusi dan kajian kebutuhan yang inklusif. Sehingga apa yang menjadi keputusan dan kepentingan bersama dapat ditempuh sesuai dengan aspirasi masyarakat, relevansi dengan program pendidikan dan didukung oleh masyarakat luas (Noviani et al., 2023; Rahmawati, 2024). Seperti yang kita ketui bersama bahwa masyarakat pesisir memiliki karakteristik yang beragam, terutama dalam hal pola mata pencaharian yang umumnya berkisar pada sektor perikanan, baik menggunakan teknologi tradisional maupun modern. Namun, dinamika ekonomi produktif masyarakat pesisir seringkali kompleks, melibatkan interaksi yang kuat antara faktor ekonomi dan ikatan sosial. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Puspitasari, (2024) yang mengungkapkan bahwa kegiatan masyarakat pesisir yang diberdayakan lebih menitikberatkan pada upaya peningkatan ekonomi, namun dianggap ini merupakan sesuatu yang lemah karena kurangnya pengawasan antar lembaga keuangan. Sedangkan menurut Ridwan & In'am (2021) bahwa implikasi dari program pemberdayaan hanya bersifat temporer (jangka pendek). Dan menurut Warren (2016) kepercayaan serta social network telah menjadi solusi yang baik dalam upaya memberdayakan masyarakat pesisir, meskipun kurangnya optimalisasi terhadap local wisdom.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir juga tidak bisa dilepaskan dari peran penting kelompok perempuan. Jika ditelusuri berdasarkan gender, ibu rumah tangga yang masuk dalam organisasi perempuan sangat memahami permasalahan yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas perempuan pesisir (Wulandari et al., 2022). Selain itu, perempuan dapat berperan sebagai agen yang produktif dalam kegiatan social (Pasaribu, 2018). Di Negeri Laha, misalnya, perempuan memiliki kontribusi signifikan dalam pengelolaan keuangan rumah tangga, serta dalam perekrutan tenaga kerja untuk kegiatan melaut. Peran ini mencerminkan betapa pentingnya perspektif gender dalam menyusun program pemberdayaan masyarakat pesisir. Menurut Indrawasih & Pradipta (2021) bahwa kesetaraan gender menjadi penentu proses pembagian peran dalam mengelola resource yang ada, baik laki-laki maupun perempuan

Oleh karena itu, kajian lapangan yang mendalam menjadi dasar untuk menyusun kurikulum pemberdayaan yang berbasis kebutuhan lokal. Kajian ini dilakukan dengan pendekatan multidisiplin yang melibatkan berbagai pihak, seperti kelompok nelayan, perempuan pesisir, akademisi, juragan kapal, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan kelompok usaha masyarakat pesisir. Melalui proses diskusi terfokus dan kolaborasi lintas sektor, diharapkan dapat teridentifikasi kebutuhan spesifik yang menjadi dasar pengembangan kurikulum, sekaligus menciptakan peluang implementasi yang sesuai dengan konteks lokal masyarakat pesisir (Kamali et al., 2023).

Model pemberdayaan masyarakat pesisir dalam konteks global didefinisikan sebagai kerangka kerja sistematis dan terintegrasi yang dirancang untuk meningkatkan kapasitas, kemandirian, dan kesejahteraan komunitas pesisir melalui intervensi multidimensional yang mencakup aspek ekonomi, sosial, budaya, dan ekologis. Sebagai variabel dependen dalam penelitian ini, model pemberdayaan dioperasionalkan melalui empat dimensi utama yang saling berinteraksi: (1) Dimensi Sosial-Ekonomi, yang mengukur tingkat peningkatan pendapatan, diversifikasi mata pencaharian, akses terhadap modal usaha, dan pengembangan keterampilan ekonomi produktif; (2) Dimensi Budaya, yang mengevaluasi revitalisasi kearifan lokal, pembentukan kelompok sosial baru, transformasi nilai-nilai tradisional yang mendukung pembangunan, dan pelestarian identitas budaya maritim; (3) Dimensi Ekologis, yang mengases kesesuaian pemanfaatan lahan pesisir, konservasi ekosistem mangrove, pengelolaan sumber daya perikanan berkelanjutan, dan adaptasi terhadap perubahan iklim; serta (4) Dimensi Pengembangan SDM, yang mengukur peningkatan pengetahuan melalui pendidikan non-formal, pengembangan keterampilan teknis dan manajerial, serta penguatan kesadaran kritis terhadap pengelolaan sumber daya. Model pemberdayaan yang efektif, menurut literatur global (Chambers & Conway, 2021; Sen, 2019; UNDP, 2020), harus bersifat partisipatif (melibatkan masyarakat dalam seluruh tahap program), holistik (mengintegrasikan berbagai aspek kehidupan komunitas), adaptif (responsif terhadap dinamika lokal dan perubahan eksternal), dan berkelanjutan (memastikan dampak jangka panjang yang dapat dipertahankan oleh komunitas sendiri).

Dalam penelitian ini, model pemberdayaan tidak hanya dipahami sebagai rangkaian program atau kegiatan, tetapi sebagai sistem yang kompleks di mana berbagai elemen saling terkait dan mempengaruhi, membentuk ekosistem pemberdayaan yang dapat menghasilkan perubahan transformatif dalam kehidupan masyarakat pesisir. Model pemberdayaan ini mencerminkan prinsip partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, menjadikan pendidikan sebagai instrumen kunci untuk menciptakan masyarakat pesisir yang

lebih mandiri, berdaya, dan mampu mengelola sumber daya pesisir secara optimal. Model pemberdayaan ini mencerminkan prinsip partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, menjadikan pendidikan sebagai instrumen kunci untuk menciptakan masyarakat pesisir yang lebih mandiri, berdaya, dan mampu mengelola sumber daya pesisir secara optimal.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus (*case study approach*). Pendekatan studi kasus dipilih karena penelitian ini berfokus pada analisis mendalam terhadap fenomena pemberdayaan masyarakat pesisir dalam konteks spesifik di Negeri Laha, yang memiliki karakteristik unik baik dari segi geografis, sosial budaya, maupun dinamika komunitas nelayan. Studi kasus memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi kompleksitas interaksi antara berbagai faktor yang mempengaruhi efektivitas pemberdayaan masyarakat pesisir secara holistik dan kontekstual (Yin, 2018). Selain itu, penelitian ini juga mengadopsi elemen pendekatan fenomenologis untuk memahami pengalaman hidup subjektif masyarakat pesisir, terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi, sosial, dan ekologis, serta bagaimana mereka memaknai upaya-upaya pemberdayaan yang telah dilakukan.

Pendekatan fenomenologis membantu menggali persepsi, nilai, dan makna yang dilekatkan oleh komunitas pesisir terhadap program pemberdayaan, sehingga hasil penelitian tidak hanya mendeskripsikan kondisi objektif tetapi juga memahami realitas subjektif dari sudut pandang pelaku (Creswell & Poth, 2018). Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2004:4) metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis, lisan dari informan dan perilaku yang diamati. Digunakan metode Deskriptif Kualitatif dalam penelitian ini dikarenakan penelitian ingin memperoleh gambaran (keterangan) yang lebih akurat dan mendalam berkaitan Sejauh mana model pemberdayaan masyarakat pesisir (Studi Kasus : Negeri Laha Teluk Ambon Baguala Kota Ambon).

Dasar penelitian yang dilakukan adalah penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis suatu peristiwa atau proses tertentu dengan memilih data atau menentukan ruang lingkup tertentu sebagai *Sampel* yang dianggap representatif. Adapun tempat penelitian ini dilaksanakan di Negeri Laha Teluk Ambon Baguala Kota Ambon dan Waktu penelitiannya dilaksanakan selama enam bulan terhitung Januari 2024-Juni 2024.

D. Informasi Kunci

Dalam penelitian ini, populasi target mencakup seluruh masyarakat pesisir di Negeri Laha yang berjumlah sekitar 2.450 jiwa dengan 612 kepala keluarga, di mana mayoritas mata pencaharian penduduknya bergantung pada sektor perikanan dan kelautan (Data Monografi Negeri Laha, 2023). Dari populasi tersebut, penelitian menggunakan teknik purposive sampling untuk memilih informan yang memiliki pengetahuan mendalam dan relevan dengan fokus penelitian. Pemilihan informan didasarkan pada kriteria: (1) keterlibatan langsung dalam aktivitas pesisir dan perikanan, (2) pengalaman minimal 5 tahun dalam komunitas nelayan, (3) kemampuan untuk memberikan informasi yang kaya dan mendalam tentang dinamika pemberdayaan masyarakat pesisir, serta (4) kesediaan untuk berpartisipasi dalam wawancara mendalam dan diskusi kelompok terfokus. Dalam penelitian ini yang menjadi sasaran informan dalam penelitian ini adalah:

Tabel 1. Daftar informan

No	Jabatan	Keterangan
1	Raja Negeri Laha	Informan Kunci
2	Kelompok Nelayan	Informan Tambahan
3	Masyarakat Pesisir	Informan Tambahan

Sumber data: Hasil Penelitian, 2024

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah merupakan usaha untuk mengumpulkan bahan-bahan yang berhubungan dengan penelitian yang dapat berupa data, fakta, gejala, maupun informasi yang sifatnya *Valid* (sebenarnya), *Realible* (dapat dipercaya), dan Obyektif (sesuai dengan kenyataan).

Studi Lapangan (*Field Research*). Studi lapangan ini dimaksudkan yaitu penulis langsung melakukan penelitian pada lokasi atau obyek yang telah ditentukan. Teknik pengumpulan data Studi lapangan ditempuh dengan cara sebagai berikut:

1. Observasi.
Observasi, yaitu proses pengambilan data dalam penelitian dimana penelitian atau pengamat dengan mengamati kondisi yang berkaitan dengan Obyek penelitian.
2. Wawancara.
Wawancara, mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara (*Interview*), adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu Pewawancara (yang mengajukan pertanyaan) dan yang di Wawancarai (yang memberikan jawaban atas pertanyaan).
3. Documentasi.
Documentasi teknik ini bertujuan melangkapi teknik observasi dan teknik wawancara secara mendalam.
4. Studi Pustaka (*Library Research*).
Studi Pustaka (*library research*) yaitu dengan membaca buku, undang-undang, dan media informasi lain yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

Teknik Analisis Data

Penelitian ini akan dianalisis dengan pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan data Primer dan Sekunder yang diperoleh dari kepustakaan maupun wawancara mendalam terhadap informasi kunci tentang berbagai hal yang berkaitan langsung dengan masalah yang di teliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Model pemberdayaan idealnya disusun atas berdasarkan analisis konteks yang meliputi analisis terhadap kondisi yang ada didalam realitas masyarakat di satuan pendidikan antara lain, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, biaya, dan program-program, serta analisis terhadap peluang dan tantangan yang ada di masyarakat dan lingkungan sekitar seperti dunia industri dan dunia kerja, sumber daya alam dan sosial budaya. Kurikulum pemberdayaan masyarakat pesisir berbasis ekonomi produktif ini disusun berdasarkan hasil analisis setelah dilakukan kajian konsep dan kajian lapangan, yang meliputi:

Aspek Sosial Ekonomi

Penduduk Pesisir di Negeri Laha hampir sebagian besar bekerja sebagai nelayan tradisional umumnya mempunyai ciri yang sama, yaitu cenderung kurang dalam capaian pendidikan formal. Misalnya, dari hasil penelitian Taib & Umar (2019), dari 50 nelayan tradisional yang diteliti, sebagian besar nelayan tradisional hanya berpendidikan SD (60%), sedangkan yang berpendidikan SMP atau sederajat sebanyak 35% responden, serta 5% berpendidikan SMA. Untuk bekal bekerja mencari ikan di laut, latar belakang pendidikan seseorang memang tidak penting (Hidayat, 2017). Artinya, karena pekerjaan sebagai nelayan sedikit-banyak merupakan pekerjaan kasar yang lebih banyak mengandalkan otot dan pengalaman, maka setinggi apa pun tingkat pendidikan nelayan itu tidaklah akan mempengaruhi kecakapan mereka melaut. Persoalan dan arti penting tingkat pendidikan ini biasanya baru muncul tatkala seorang nelayan ingin berpindah pekerjaan lain yang lebih menjanjikan. Dengan pendidikan yang rendah, ini berarti kondisi itu akan mempersulit nelayan tradisional dalam memilih atau mendapatkan pekerjaan lain, selain menjadi nelayan. (Hamdani & Wulandari, 2016)

Di kalangan keluarga nelayan tradisional, mempekerjakan anak-anak untuk ikut membantu orang tua mencari nafkah dalam usia dini adalah hal yang biasa, sehingga anak-anak mereka pun rata-rata tidak sempat menyelesaikan pendidikan hingga jenjang yang tertinggi di negerinya. Berbeda dengan juragan kapal atau nelayan modern yang rata-rata hidup berkecukupan, kondisi ekonomi keluarga nelayan tradisional seringkali hidup serba pas-pasan, atau relatif kekurangan dan bahkan sangat kekurangan. Dengan kondisi musim ikan yang hanya sekitar tiga bulan dalam setahun, memang sulit berharap keluarga nelayan tradisional bisa memperoleh penghasilan yang memadai, apalagi penghasilan itu untuk kepentingan menabung. Bagi juragan kapal dan nelayan modern yang memiliki banyak perahu, aset produksi lebih, memiliki sumber pemasukan alternatif di luar sektor perikanan yang bisa diandalkan, dan ditambah lagi dengan pemilikan tabungan yang cukup, atau investasi di bidang usaha lain di luar perikanan, memang kondisi ekonomi mereka relatif tidak akan terpengaruh musim. Meskipun, mereka yang dapat dikategorikan sedemikian itu, di wilayah pesisir umumnya bisa dihitung dengan jari. Bisa dibayangkan, apa yang dapat dilakukan keluarga nelayan tradisional jika hasil sehari-hari yang mereka peroleh tidak menentu, sementara kebutuhan sehari-hari terus melambung tak terkendali. Selama ini, banyak penelitian yang menunjukkan bahwa nelayan umumnya termasuk dalam kelompok masyarakat dengan tingkat kemiskinan tertinggi (Sulestiani, 2012). maka yang namanya keluarga nelayan tradisional boleh jadi adalah lapisan yang lebih miskin lagi. Mereka adalah korban pertama yang paling menderita dan mengalami marginalisasi akibat proses modernisasi perikanan dan tekanan krisis.

Di wilayah pesisir Negeri Laha, memang cukup banyak nelayan modern telah memiliki perahu bermotor untuk alat mendukung mencari ikan di laut atau secara ringkas mereka dikategorikan nelayan modern. Tetapi, ukuran modernitas nelayan sendiri sebetulnya bukan semata-mata karena menggunakan motor untuk menggerakkan perahu, melainkan juga pada besar-kecilnya motor yang digunakan serta tingkat eksploitasi dari alat tangkap yang digunakan. Itu artinya, semakin jauh wilayah pencaharian ikannya ke tengah lautan semakin besar pula hasil tangkapannya. Namun, cara inipun tentu memerlukan modal yang tidak sedikit, serta kehandalan awak kapal yang terlibat di dalamnya. Sebab, mereka menyadari, daerah penangkapan ikut berdampak pada penggunaan alat (Azis, 2021). Teknologi penangkapan ikan

yang modern akan cenderung memiliki kemampuan jelajah sampai di lepas pantai (off shore), sebaliknya untuk nelayan tradisional wilayah tangkapnya hanya sebatas perairan pantai.

Bagi nelayan tradisional, jelas dengan tidak memiliki alat tangkap ikan yang modern akan menyebabkan kehidupan mereka makin terpuruk tatkala sumber daya laut makin langka. Nelayan tradisional ini, umumnya adalah kelompok masyarakat yang dikategorikan buruh sehingga kehidupan ekonominya dapat dikatakan paling miskin dan tidak berdaya (Putri, 2021). Dikatakan miskin, karena per bulan penghasilan sekeluarga di bawah pendapatan yang seharusnya diperoleh rata-rata penduduk yang capaian ekonomi memadai atau setara dengan Rp 1 Juta per-bulan. Bisa dibayangkan, apa yang dapat dilakukan keluarga nelayan tradisional jika penghasilan mereka hanya sekecil itu. Dengan jumlah anak rata-rata lebih dari 2-3 orang.

Seseorang yang sehari-hari bekerja sebagai nelayan tradisional saja, kondisi ekonominya bisa dipastikan kurang-lebih sama dengan buruh nelayan. Hanya bedanya, buruh nelayan sering kali memiliki pendapatan rendah akibat sistem bagi hasil yang tidak adil, sedangkan nelayan tradisional hanya memperoleh penghasilan yang pas-pasan karena hasil tangkapan mereka cenderung sedikit, bahkan tidak ada sama sekali, terutama saat musim paceklik ikan (Sulestiani, 2012). Mereka mengaku, sebagai nelayan tradisional, memang untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari sampai saat ini relatif tidak menjadi masalah, meski mungkin dalam ukuran yang sangat sederhana. Jelas capaian kebutuhan itu, sebatas memenuhi makan yang amat sederhana sebab mereka mengabaikan untuk memenuhi kebutuhan dasar lain di luar kebutuhan pangan. Seperti halnya, untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, hampir sebagian besar nelayan pesisir menyatakan tidak mampu. Hal yang sama juga berlaku ketika mereka harus memenuhi kebutuhan kesehatan dan biaya sosial lingkungan. Mereka menyatakan tidak mampu ketika ada salah satu anggota keluarganya yang jatuh sakit. Dengan penghasilan yang sangat minim dan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari, keluarga nelayan tradisional yang kurang mampu menghadapi kesulitan besar ketika harus mengeluarkan biaya tambahan untuk berobat ke dokter atau membeli obat di apotek, yang bagi mereka dianggap cukup mahal (Hikmah, 2023).

Secara ideal, sebuah keluarga yang tidak lagi dapat mengandalkan kelangsungan hidupnya hanya dari satu mata pencaharian di sektor perikanan sebaiknya mencari sumber pendapatan alternatif. Pilihan yang paling realistis adalah mengupayakan pekerjaan di sektor non-perikanan yang tidak bergantung pada musim (Setiawan, 2021). Tetapi, untuk mewujudkan hal ini tentu tidaklah semudah membalik telapak tangan, meskipun diakui oleh sebagian nelayan tradisional atau buruh yang akan mengalihkan pencahariannya tatkala mereka memasuki musim berganti dengan bekerja keluar negerinya misalnya dengan menjadi buruh pelabuhan di pelabuhan Slamed Riyadi Kota Ambon. Namun cara itu, tentunya dipengaruhi oleh pertama, berkaitan dengan persoalan tingkat pendidikan. Bagi warga masyarakat nelayan yang memiliki keahlian khusus dan berpendidikan tinggi, jika pada satu titik hasil dari sektor perikanan tidak lagi bisa mereka harapkan, kemungkinan untuk beralih profesi paling tidak diatas kertas masih terbuka. Tetapi, bagi nelayan tradisional yang tidak berpendidikan dan tidak memiliki ketrampilan alternatif, maka mati-hidup mereka sebetulnya mutlak tergantung pada hasil dari sektor perikanan. Kedua, berkaitan dengan penguasaan keterampilan alternatif yang dimiliki mereka.

Cara lain untuk mengatasi kesulitan ekonomi keluarga nelayan, biasanya usaha yang dikembangkan keluarga-keluarga miskin untuk tetap bertahan hidup adalah dengan

menggadaikan atau menjual barang, utang ke sana-kemari, dan yang tidak kalah penting dengan mengandalkan pada dukungan kerabat, semacam mekanisme bertahan hidup dengan cara mencari asuransi sosial dari kerabat yang difungsikan sebagai semacam patron. Seperti diakui sebagian besar keluarga nelayan tradisional, salah satu strategi yang acapkali mereka kembangkan untuk mengatasi tekanan kebutuhan hidup sehari-hari adalah dengan mengandalkan dukungan dari kerabat. Cara yang mereka kenal sebagai sambatan, yaitu mekanisme tolong menolong sesamanya untuk menunjang kehidupan sehari-hari (Ibrahim, 2019). Fungsi kerabat pada dasarnya memang bukan hanya sebagai tempat untuk mensosialisasikan anak-anak, tetapi kerabat juga berfungsi sebagai kelompok primer yang menopang dan memberikan jaminan sosial-ekonomi bagi anggota kerabatnya.

Dengan demikian, bagi para nelayan tradisional di pesisir Desa Laha, seringkali hidup memang tidak terlalu menawarkan banyak pilihan. Sekali pun disadari bahwa dalam kehidupan sehari-hari hasil dari melaut acapkali tidak bisa diandalkan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, tetapi karena pekerjaan itu sudah dijalankan selama bertahun-tahun (Kusnadi, 2002). Bahkan, tidak jarang pekerjaan ini juga merupakan usaha warisan secara turun-temurun, maka tidak bisa lain, yang dilakukan adalah menjalani dan menerimanya sebagai warisan atas pekerjaan itu dari orang tua. Dari sebagian besar warga masyarakat yang bergelut dalam pencaharian di laut, mereka mengaku sudah menekuni pekerjaan itu sebagai nelayan tradisional lebih dari 25 tahun. Jarang ditemui ada nelayan yang menyatakan baru saja menggeluti usahanya kurang dari lima tahunan, kalau pun terjadi umumnya itu adalah anak-anak muda yang melanjutkan tradisi pekerjaan orang tuanya menjadi nelayan tradisional. Menurut Masyhuri (2003) bahwa alasan utama mereka yang menekuni pekerjaan sebagai nelayan tradisional adalah karena tidak ada alternatif pekerjaan lain yang dapat mereka pilih.

Meskipun lingkungan kota besar yang dalam banyak hal lebih menawarkan kemudahan dan memiliki kemampuan involutif yang luar biasa untuk menyerap setiap penambahan migran dan tenaga kerja baru. Namun untuk sebagian lagi dari mereka menyatakan, kesempatan untuk mencari pekerjaan alternatif acapkali seperti menemui jalan buntu. Kebanyakan dari mereka alasan utama menekuni pekerjaannya sekarang adalah karena sesuai dengan keahlian yang sudah turun temurun. Alasan seperti ini antara lain disebabkan mereka sejak usia anak-anak telah dikenalkan dan ikut terlibat langsung dengan pekerjaan orang tuanya sebagai nelayan (Henaulu & Ely, 2019). Pada musim paceklik seperti ini hasil tangkapan ikan nelayan niscaya akan turun drastis. Bahkan tidak jarang nelayan tradisional tidak mendapatkan hasil sama sekali. Tidak adanya ikan yang dapat ditangkap berarti para nelayan tradisional juga tidak dapat memperoleh pendapatan (Henaulu et al., 2022). Dengan kata lain, pada saat musim paceklik yang relatif panjang, nelayan tradisional akan menghadapi masalah penurunan pendapatan yang serius. Ketika musim paceklik tiba, jika para nelayan memaksa diri pergi ke laut untuk menangkap ikan, maka tidak mustahil mereka akan menghadapi kemungkinan kerugian lebih besar.

Bagi mereka, bentuk-bentuk mekanisme bertahan hidup yang biasa mereka kembangkan untuk menyalakan tekanan kebutuhan hidup selama musim paceklik adalah: (1) mengandalkan pada tabungan yang masih tersisa untuk membeli kebutuhan hidup sehari-hari -bagi mereka yang memiliki tabungan- seperti dalam bentuk barang (motor, emas atau perhiasan lain); (2) bekerja sebagai buruh nelayan di kapal yang bermesin besar (itupun jika kemampuan yang dimiliki mendukungnya); dan (4) hidup dari utang serta uluran tangan orang lain. Di mata

mereka semua pilihan ini tentu bukan hal yang mudah untuk dilakukan, tetapi, karena sudah puluhan tahun hidup mereka serba kekurangan, maka sekeras apa pun tekanan kemiskinan yang harus dihadapi, hal itu biasanya tidak lagi mengagetkan nelayan tradisional. Bagi keluarga nelayan tradisional, kemiskinan dalam beberapa hal memang terasa menekan, tetapi ketika tekanan kemiskinan itu terus -menerus terjadi dan dialami, bukanlah sesuatu yang harus dihindari tetapi justru bagi mereka harus dihadapi.

Aspek Budaya

Aspek budaya yang melekat pada masyarakat Negeri Laha, seperti ritual melaut yang dulunya dilakukan saat musim gelombang tinggi, kini semakin jarang dilakukan, terutama di era modern ini. Tradisi tersebut, yang dahulunya menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat pesisir, mulai tergeser oleh perkembangan zaman dan perubahan pola hidup masyarakat. Upacara tahunan pesta laut, yang dahulu menjadi salah satu puncak perayaan budaya masyarakat pesisir, kini hanya diadakan pada hari-hari besar tertentu dan itupun bergantung pada adanya dukungan atau sponsor.

Fenomena ini menunjukkan bahwa nilai-nilai budaya yang dahulu sangat dihormati mulai terpinggirkan seiring dengan perubahan orientasi masyarakat yang lebih fokus pada aspek ekonomi dan modernitas. Kearifan lokal, yang dulunya menjadi panduan dalam menjalani aktivitas melaut dan menjaga keseimbangan dengan alam, kini tampaknya tidak lagi menjadi prioritas dalam aktivitas masyarakat pesisir Negeri Laha. Hal ini bisa jadi disebabkan oleh tekanan ekonomi, kebutuhan hidup yang semakin mendesak, atau pengaruh dari globalisasi yang membawa pola pikir baru yang lebih praktis dan efisien (Suprijanto, 2011). Hilangnya perhatian terhadap aspek budaya ini tentu menjadi tantangan besar, terutama dalam upaya menjaga identitas dan keberlanjutan tradisi lokal. Padahal, menurut Mantu (2015) nilai-nilai budaya dan kearifan lokal tersebut memiliki peran penting tidak hanya dalam membangun kohesi sosial masyarakat, tetapi juga dalam menjaga hubungan harmonis antara manusia dan lingkungannya. Jika tidak ada upaya untuk melestarikan budaya tersebut, masyarakat pesisir berisiko kehilangan warisan budaya yang berharga bagi generasi mendatang.

Aspek Ekologis

Dari segi ekologi, kawasan pesisir Negeri Laha, Kota Ambon, tampak belum dikelola secara maksimal. Pengelolaan wilayah pesisir di kawasan ini terlihat belum terintegrasi dengan baik, dan masih ditemukan banyak pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Misalnya, badan jalan yang seharusnya digunakan sebagai sarana transportasi malah dimanfaatkan sebagai lokasi perdagangan hasil perikanan, daerah aliran sungai dijadikan tempat bersandar kapal nelayan, dan lahan konservasi mangrove dialihfungsikan menjadi kawasan permukiman atau bahkan tempat pembuangan sampah.

Kondisi lingkungan di kawasan pesisir ini sering kali kurang mendapat perhatian. Situasi ekologi di daerah tersebut cukup memprihatinkan, dengan tegakan mangrove yang jumlahnya sangat minim dan kondisi yang semakin rusak. Mangrove yang seharusnya memiliki fungsi biologis penting, seperti menjadi feeding ground dan nursery ground bagi berbagai biota laut, kini hanya menjadi tempat penumpukan sampah. Hal ini mencerminkan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga ekosistem pesisir.

Padahal, kawasan ini memiliki potensi yang cukup besar jika dikelola dengan baik. Masih tersedia banyak lahan yang dapat dimanfaatkan, khususnya untuk pengembangan sektor perikanan dan kelautan. Selain itu, kawasan pesisir ini juga memiliki peluang untuk dikembangkan dalam bidang industri maupun wisata bahari. Dengan pengelolaan yang tepat, potensi tersebut dapat dimaksimalkan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan sekaligus memperbaiki kondisi ekologi kawasan pesisir (Felly et al., 2021), termasuk di Negeri Laha Teluk Ambon.

Aspek Potensi Pengembangan SDM

Negeri Laha, Kota Ambon, merupakan wilayah dengan potensi sumber daya alam dan sosial ekonomi yang cukup besar, yang seharusnya mampu mendukung pemenuhan kebutuhan masyarakat serta menjadi sumber pendapatan daerah. Namun, hingga saat ini, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal baik untuk kepentingan masyarakat lokal maupun sebagai kontribusi terhadap pendapatan daerah.

Dalam konteks pendidikan dan pemberdayaan, kurikulum yang dirancang diharapkan mampu menjawab tiga aspek utama untuk pengembangan kapasitas masyarakat, yaitu:

a. Penguatan Pengetahuan

Kurikulum ini harus memuat materi dan metode pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan masyarakat, khususnya masyarakat pesisir. Ini sesuai dengan apa yang disampaikan Maak et al., (2022) bahwa pengetahuan tersebut akan menjadi dasar untuk memahami berbagai aspek yang relevan dengan pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan ekonomi lokal.

b. Penguatan Keterampilan

Mengingat kurikulum ini ditujukan untuk kelompok masyarakat pesisir, termasuk nelayan dan perempuan, yang umumnya memiliki tingkat pendidikan formal yang rendah, materi pembelajaran harus disusun untuk meningkatkan keterampilan hidup. Fokusnya adalah memberikan keterampilan baru atau memperkuat keterampilan yang sudah dimiliki, sehingga mereka dapat lebih mandiri dan mampu mengatasi tantangan ekonomi secara efektif (Mustamiin, 2023).

c. Penguatan Kesadaran

Selain memberikan pengetahuan dan keterampilan, kurikulum ini juga diarahkan untuk membangun karakter dan mengubah pola pikir masyarakat. Materi dan metode yang digunakan akan dirancang untuk menumbuhkan kesadaran kritis, sehingga masyarakat tidak hanya diberdayakan secara ekonomi, tetapi juga memiliki kesadaran untuk menjaga lingkungan dan memanfaatkan sumber daya secara berkelanjutan (Nikawanti, 2021).

Melalui pendekatan yang komprehensif ini, kurikulum diharapkan dapat mendukung pemberdayaan masyarakat secara menyeluruh, mencakup aspek intelektual, praktis, dan kesadaran kritis.

KESIMPULAN

Adapun beberapa kesimpulan yang dapat diantara lain: Aspek sosial ekonomi dalam hal ini, pengembangan model kurikulum pemberdayaan masyarakat pesisir berbasis ekonomi produktif merupakan upaya untuk mendorong kemandirian dengan meningkatkan kapasitas individu dan kelompok. Aspek Budaya dalam hal transformasi sosial yang dapat membentuk

kelompok-kelompok sosial baru di kalangan masyarakat pesisir sehingga terciptanya program pembangunan kepada kelompok sasaran yang sejalan dengan realitas sosial dan budaya. Aspek ekologis, dalam hal ini pemanfaatan lahan belum sesuai dengan fungsinya sehingga terjadi, banyak terjadi aktivitas masyarakat nelayan yang menyebabkan penumpukan sampah. Aspek Pengembangan sumber daya manusia, diharapkan untuk menyusun kurikulum ini, lembaga atau daerah memperhatikan kebutuhan, kepentingan, potensi dan peluang yang ada pada kelompok nelayan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adzkiyak, A. (2024). Anak nelayan putus sekolah: Pendahuluan pendidikan merupakan salah satu faktor kunci dalam pembangunan suatu negara. *Education Journal: Journal Education Research and Development*, 8(2), 483–497. <https://doi.org/10.31537/ej.v8i2.1965>
- Arfah, Sulistyanto, Rianto, B., Wahyudi, A., Raharja, W. T., Tranggono, D., & Wuryandari, Y. (2022). Pengembangan kapasitas sumber daya manusia BUMDes Kalanganyar Makmur Sidoarjo. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Pesisir*, 3, 71–76. <https://doi.org/10.30649/jpmp.v1i2.87>
- Azis, A. Y. (2021). Perkembangan teknologi alat tangkap ikan nelayan di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi tahun 2001–2013. *AVATARA: e-Journal Pendidikan Sejarah*, 11(1), 1–12.
- Baharudin, B. (2014). Pendidikan dan pengentasan kemiskinan masyarakat nelayan pesisir. *Society: Jurnal Jurusan Pendidikan IPS Ekonomi*, 5(1), 57–67.
- Felly, P., Warouw, F., Mambo, C. D., Grace, Lady, Giroth, J., Euckleysia, B., & Komedi, J. (2021). *Metabolisme pariwisata berkelanjutan kawasan pesisir Pantai Teluk Manado*. CV Literasi Nusantara Abadi. <http://repository.unima.ac.id:8080/bitstream/123456789/640/1/Metabolisme%20PAriwisata%20By%20Fero%20dan%20Tim%20With%20Cover-compressed.pdf>
- Hamdani, H., & Wulandari, K. (2016). Faktor penyebab kemiskinan nelayan tradisional (The factor of poverty causes traditional fisherman). *E-Sospol*, 3(1), 62–67.
- Handini, S., Sukesni, S., & Astuti, H. K. (2019). Pemberdayaan masyarakat desa. In *Scopindo Media Pustaka* (Vol. 11, Issue 1). <http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf>
- Henaulu, A. K., & Ely, A. J. (2019). Eksplorasi penentuan lokasi tangkap perikanan nelayan bubu tradisional Desa Assilulu menggunakan teknologi pendeteksi fish finder. *Airaha*, 8(2), 160–171. <https://doi.org/10.15578/ja.v8i02.137>
- Henaulu, A. K., Tuasikal, T., Rahman, A., Marasabessy, R. S., Wahyudi, I., Sofyan, Y., ... Ady, K. (2022). Pemanfaatan penggunaan fish finder bagi nelayan bubu tradisional Desa Assilulu. *Soliditas: Jurnal Aplikasi dan Inovasi Ipteks*, 5(1), 68–76. <https://doi.org/10.31328/js.v5i1.3278>
- Hidayat, M. (2017). Problematika internal nelayan tradisional Kota Padang: Studi faktor-faktor sosial budaya penyebab kemiskinan. *Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education*, 4(1), 31–40. <https://doi.org/10.24036/scs.v4i1.15>
- Hikmah, N. (2023). *Perilaku hidup sehat pemulung di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Gampong Jawa Kota Banda Aceh* [Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry].

- <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/36950/>
- Ibrahim, J. T. (2019). *Sosiologi pedesaan*. Universitas Muhammadiyah Malang. <https://books.google.co.id/books?id=Y8NrEAAAQBAJ>
- Indrawasih, R., & Pradipta, L. (2021). Pergerakan sosial perempuan pesisir dalam memperjuangkan hak asasi manusia dan kesetaraan gender. *Satwika: Kajian Ilmu Budaya dan Perubahan Sosial*, 5(1), 105–117. <https://doi.org/10.22219/satwika.v5i1.15537>
- Kamali, S. R., Hermanto, D., Romdhini, M. U., Hamdiani, S., Ismillayli, N., Kurniawati, L., & Mariana, B. (2023). Edukasi kimia dan matematika untuk masyarakat pesisir sebagai langkah awal dalam mengatasi pencemaran lingkungan. *Jurnal Pendidikan dan Pengabdian Masyarakat*, 6(4), 247–251.
- Kristiyanti, M. (2016). Pemberdayaan masyarakat pesisir pantai melalui pendekatan ICZM (Integrated Coastal Zone Management). *Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu & Call for Paper UNISBANK (SENDI_U)*, 752.
- Kusnadi, K. (2002). *Konflik sosial nelayan, kemiskinan dan perebutan sumber daya perikanan*. PT LKS Pelangi Aksara. <https://books.google.co.id/books?id=ktJjDwAAQBAJ>
- Maak, C. S., Muga, M. P. L., & Kiak, N. T. (2022). Strategi pengembangan ekowisata terhadap ekonomi lokal pada Desa Wisata Fatumnasi. *OECONOMICUS Journal of Economics*, 6(2), 102–115. <https://doi.org/10.15642/oje.2022.6.2.102-115>
- Mantu, R. (2015). Memaknai “Torang Samua Basudara” (manajemen dakwah berbasis kearifan lokal di Kota Manado). *Potret Pemikiran*, 19(2), 42–65. <https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/PP/article/view/731>
- Masyhuri, I. (2003). Kemiskinan dalam masyarakat nelayan. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 5(1), 63–82. <https://jmb.lipi.go.id/jmb/article/view/259/237>
- Mustamiin, M. Z. (2023). Dedikasi: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat. *Dedikasi: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 3(2), 41–46. <https://doi.org/10.70004/dedikasi.v3i02.56>
- Nikawanti, G. (2021). Ecoliteracy: Membangun ketahanan pangan dari kekayaan maritim Indonesia. *Jurnal Kemaritiman: Indonesian Journal of Maritime*, 2(2), 149–166. <https://doi.org/10.17509/ijom.v2i2.37603>
- Noviani, D., Hilmin, Elhefni, & Mustafiyanti. (2023). Model kebijakan pemerintah desa dalam penguatan pendidikan nonformal keagamaan untuk pemberdayaan masyarakat. *IHSANIKA: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 1(3), 21–35.
- Nurrochsyam, M. W., Suprastowo, P., Trilestari, I., & Mursalim, M. (2017). *Pelayanan pendidikan bagi komunitas adat*. Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Kemendikbud. <https://litbang.kemdikbud.go.id>
- Pasaribu, A. T. M. (2018). *Peranan perempuan pesisir dalam meningkatkan daya tahan ekonomi keluarga nelayan* [Tesis, Universitas Sumatera Utara]. <http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/5771>
- Puspitasari, D. (2024). Pemberdayaan masyarakat pesisir terkait perekonomian di Desa Mororejo Kabupaten Kendal dengan perspektif modal sosial. *Jurnal*, 2(2), 2774–2776.
- Putri, K. A. (2021). Perbedaan tingkat kesejahteraan nelayan punggawa dan sawi di Sulawesi Selatan serta penyebabnya. *Academia.edu*, 1–15. <https://d1wqtxtslxzle7.cloudfront.net/67501405/>

- Rahmawati, S. (2024). *Implementasi pendekatan multikultural dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam SMK PGRI Semaka PGRI Semaka*. *Unisan Jurnal: Jurnal Manajemen dan Pendidikan*, 3(2), 727–740. <http://journal.an-nur.ac.id/index.php/unisanjournal/article/view/2511>
- Ridwan, M., & In'am, A. (2021). Social capital deviation in capital assistance system: Socio-economic studies of coastal communities. *Economies*, 9(4). <https://doi.org/10.3390/economies9040204>
- Sabarisman, M. (2017). Identifikasi dan pemberdayaan masyarakat miskin pesisir. *Sosio Informa*, 3(3), 216–235. <https://doi.org/10.33007/inf.v3i3.707>
- Setiawan, N. H. (2021). *Analisis peran organisasi masyarakat Melayu Kecamatan Mandau dalam mengupayakan pelaksanaan program penempatan tenaga kerja lokal pada perusahaan swasta sesuai Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2004 tentang penempatan tenaga kerja lokal di Kabupaten Bengkalis* [Skripsi, Universitas Islam Riau]. <https://repository.uir.ac.id/10602/>
- Sulestiani, A. (2012). Karakteristik sosial ekonomi masyarakat nelayan. *Agridevina: Berkala Ilmiah Agribisnis*, 11(1), 149–159. <http://dspace.hangtuah.ac.id:8080/xmlui/bitstream/handle/dx/1324/Jurnal%20lepas%20Bu%20Aniek.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Suprijanto, A. (2011). Dampak globalisasi ekonomi terhadap perekonomian Indonesia. *Jurnal Ilmiah Civis*, 1(2), 100–119. (Catatan: Tautan asli berupa file lokal pengguna, tidak dapat dicantumkan sebagai URL publik.)
- Taib, Z., & Umar, A. (2019). Analisis sosial ekonomi nelayan tradisional di daerah 3T Kabupaten Pulau Morotai. *Agriprimatech*, 3(1), 38–46. <https://jurnal.unprimdn.ac.id/index.php/Agriprimatech/article/view/779>
- Warren, C. (2016). Leadership, social capital and coastal community resource governance: The case of the destructive seaweed harvest in West Bali. *Human Ecology*, 44(3), 329–339. <https://doi.org/10.1007/s10745-016-9832-y>
- Wulandari, N., Indrianti, D. T., & Hilmi, M. I. (2022). Analisis gender peran perempuan pesisir pada ketahanan keluarga di Desa Puger Kulon Kabupaten Jember. *Jendela PLS*, 7(1), 52–60. <https://doi.org/10.37058/jpls.v7i1.4758>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).